

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan Rakyat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Kesejahteraan rakyat juga adalah tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan, “(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Salah satu masalah kesejahteraan sosial di Indonesia adalah kemiskinan. Dalam Agenda Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) membahas “Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 % pada akhir tahun 2019”.

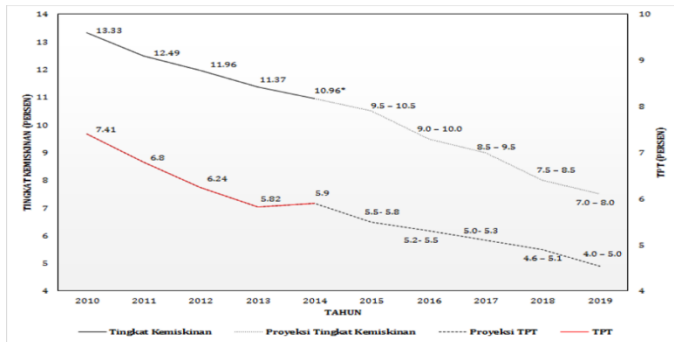
Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1
Proyeksi Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran
Terbuka 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,64%, turun tipis dibandingkan September 2016 yaitu 10,7% dan pada bulan maret 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25% jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang. Selain itu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2014) mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kesejahteraan sarannya. Terlihat dari total pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rata-rata meningkatkan 10% per kapita dari kondisi sebelum dilaksanakannya program. PKH juga meningkatkan perilaku kesehatan pesertanya. Selain itu, pada bidang pendidikan juga PKH menunjukkan dampak yang signifikan. Tingkat partisipasi sekolah meningkat dan membantu mengurangi populasi tenaga kerja anak namun dalam peningkatan yang relatif rendah. Kenyataannya, PKH memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, namun masih belum optimal. PKH belum memberikan yang berkaitan

Resta Araisita, 2018

*DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat
 Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang
 Kabupaten Subang*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
 perpustakaan.upi.edu

dengan perubahan pola pikir keluarga terhadap masa depan dan peningkatan etos kerja melalui pendidikan keluarga.

Kemiskinan bahkan menjadi perhatian utama bagi seluruh penduduk dunia. Menurut Tjokrowinoto (Sulistiyani, 2004, hlm. 27):

“kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, reendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya menyangkut masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga masalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting karena melalui pendidikan seseorang akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan, dapat bersosialisasi dan membentuk karakter seseorang kearah yang lebih baik. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pada kenyataannya berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016/2017 dilihat masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Indonesia.

Angka putus sekolah berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016/2017 bahwa jenjang pendidikan SD sederajat 0,15% dan yang tidak melanjutkan ke SMP 21,92%, jenjang pendidikan SMP sederajat 0,39% dan yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK 2,18%, sedangkan jenjang pendidikan SMA/SMK yaitu 2,52%. UNDP menyatakan bahwa Indonesia meraih angka 0,689 berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kompas, 2017). Salah satu sorotan UNDP adalah kesenjangan pendidikan Indonesia yang lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

dan Pasifik. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan. Berdasarkan data pada tahun 2017 sebanyak 47,3% tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya, kemudian 31% karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4% karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal. Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi alasan masyarakat Indonesia tidak menyekolahkan anak-anaknya. Biaya pendidikan yang mahal membuat pemerintah mencanangkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), namun program BSM ini kurang efektif karena melihat hasil evaluasi dari program BSM yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa kelemahan dari program BSM yaitu terkait ketepatan penetapan sasaran BSM dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima BSM.

Melihat kurang efektifnya program BSM dan masih banyaknya angka putus sekolah, pemerintah mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan pasal 1 ayat 1 menyatakan “Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat menjadi PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”. Program PKH merupakan program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan intervensi terhadap keluarga penerima manfaat (KPM). Pemberian bantuan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan akses pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan untuk jangka panjang, mensyaratkan KPM untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

anak-anak ataupun ibu hamil yang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Adapun kriteria keluarga yang berhak menerima program keluarga harapan dikutip dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan pasal 5 yaitu “(1) kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 meliputi ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun; (2) kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 meliputi anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun; (3) kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 meliputi lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat”. Peserta PKH sendiri adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diwakili oleh ibu dalam keluarga.

Pemberian bantuan dengan persyaratan atas kepatuhan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan tersebut belum secara optimal mencapai tujuan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung, perawatan anak dibawah dua tahun yang tidak memadai, ketidaktahuan ibu terhadap manfaat Air Susu Ibu (ASI) serta buruknya perlakuan keluarga terhadap anak (Pedoman Diklat P2K2 FDS PKH, 2017). Ketidaktahuan atau ketidakpedulian KPM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau akses informasi yang terbatas. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan bagi keluarga penerima manfaat. Untuk mensukseskan PKH, Kementerian Sosial menggalakkan berbagai kegiatan guna menciptakan masyarakat yang mandiri serta mengubah perilaku masyarakat keluarga penerima manfaat. Salah satu langkah mengimplementasikan kegiatan tersebut yakni dengan adanya kegiatan *Family Development Session* (FDS).

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Family Development Session (FDS) adalah usaha meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalani kehidupannya melalui proses belajar. *Family Development Session (FDS)* merupakan kegiatan proses pembelajaran berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis yang menitik beratkan pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan ekonomi. Kegiatan FDS adalah kegiatan belajar bagi peserta PKH yang mendorong terciptanya masyarakat gemar belajar. Kegiatan FDS dilaksanakan satu bulan sekali dalam suatu modul dengan berbagai sesi yang berurutan. Adanya kegiatan FDS dalam program PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengubah pola pikir peserta PKH dalam menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian peserta PKH terhadap masa depan dan peningkatan etos kerja melalui pendidikan keluarga. Pendamping PKH tidak hanya berperan sebagai petugas yang memonitor kepatuhan KPM melainkan berperan juga sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Selain itu, fasilitator juga sebagai pelatih yang melakukan tugas pembimbingan konsultasi, dan penyampaian materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku KPM. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Fikri (2015) menunjukkan bahwa presentasi dari aspek kemampuan pendidik dapat meningkatkan kemampuan warga belajar *Family Development Session* ditunjang oleh proses pembelajaran. Adapun proses pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan proses pembelajaran mengutamakan sikap saling menghormati dan disiplin. Selain kredibilitas fasilitator, banyak faktor keberhasilan dari suatu program yang salah satunya yaitu sikap keterbukaan peserta PKH dalam menerima pemaparan yang diberikan oleh pendamping dalam kegiatan *Family Development Session* untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Tifani Kartika Putri dan M. Farid Ma'ruf (2017) bahwa pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat dari tiga pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli (2) tahap transformasi kemampuan berupa pengetahuan, kecakapan-kecakapan,

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

keterampilan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada kemandirian. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Nataya dan Supriyadi (2017) bahwa KPM sudah mulai untuk menerapkan penerapan FDS dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari kemandirian yang ditunjukkan KPM dengan adanya perubahan pola pikir, sikap dan perilaku. Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku dapat ditunjukkan melalui perubahan sikap dalam masing-masing KPM serta menyadari kondisi kemiskinan mereka dan keinginan untuk lepas dari kemiskinan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu “untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial”. Untuk mencapai tujuan Program Keluarga Harapan perlu adanya upaya pendamping untuk memberikan materi terkait FDS dengan melakukan diklat FDS. Selain diklat FDS, kegiatan belajar mengajar untuk KPM menentukan keberhasilan tujuan dari program PKH. Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten penerima Program Keluarga Harapan yang tersebar di seluruh kecamatan dan seluruh kelurahan. Khusus di Kelurahan Pasirkareumbi terdapat 60 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 RW. Pendamping PKH melaksanakan kegiatan *Family Development Session* minimal setiap satu bulan sekali bersamaan dengan kegiatan pertemuan kelompok yang diselenggarakan di rumah keluarga penerima manfaat. Setelah mengikuti kegiatan FDS, peserta PKH yaitu KPM yang mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai pedagang di Kelurahan Pasirkareumbi ini menunjukkan perubahan yang positif. Dilihat dari kesehariannya KPM sudah mulai melek akan pentingnya pola hidup sehat dengan merawat lingkungan rumah dan mencuci tangan. Selain dari itu, KPM pun mulai melek akan pentingnya pendidikan yang mendorong anak-anaknya untuk mulai bersekolah. Berdasarkan pada hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk mengkaji dampak *Family Development Session* terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat (Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang

Resta Araisisa, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Kabupaten Subang). Penelitian ini bermaksud mencari fakta mengenai faktor yang mempengaruhi kemandirian keluarga penerima manfaat dan dampak setelah mengikuti *Family Development Session* dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti *Family Development Session*.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

1. Adanya peningkatan partisipasi dalam bidang pendidikan ditunjukkan oleh kepedulian keluarga khususnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan peningkatan partisipasi sekolah anak dalam Keluarga Penerima Manfaat.
2. Adanya peningkatan pemahaman akan pentingnya kesehatan ditunjukkan oleh banyaknya orang tua yang membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi dan memeriksakan anaknya ke bidan terdekat.
3. Kurangnya penerapan Keluarga Penerima Manfaat dalam bidang ekonomi seperti menyesuaikan antara pengeluaran dan pendapatan.
4. Berdasarkan studi pendahuluan terhadap KPM bahwa 100% KPM Kelurahan Pasirkareumbi selalu hadir saat pemberian materi tentang FDS dan 67% KPM telah mengimplementasikan pemaparan FDS dalam kehidupan sehari-hari..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana dampak *Family Development Session* terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat program keluarga harapan kabupaten Subang?”

Rumusan masalah tersebut peneliti jabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kredibilitas fasilitator dalam mendampingi keluarga penerima manfaat dalam kegiatan *Family Development Session*?
2. Bagaimana sikap keterbukaan keluarga penerima manfaat dalam menerima inovasi yang disampaikan pada kegiatan *Family Development Session*?

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana tingkat kemandirian keluarga penerima manfaat setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kegiatan *Family Development Session*?
4. Sejauh mana kredibilitas fasilitator dan sikap keterbukaan keluarga penerima manfaat berpengaruh terhadap kemandirian keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kredibilitas fasilitator dalam penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session*.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengamati sikap keterbukaan keluarga penerima manfaat dalam menerima inovasi yang disampaikan pada kegiatan *Family Development Session*.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemandirian keluarga penerima manfaat setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kegiatan *Family Development Session*
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dari kredibilitas fasilitator dan sikap keterbukaan keluarga penerima manfaat terhadap kemandirian keluarga.

1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan bidang pendidikan khususnya mengenai hal – hal yang berkaitan dengan dampak *Family Development Session* terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di kabupaten Subang.

Secara praktis bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana belajar dalam mengungkapkan dampak pada *Family Development Session* dan bagi penyelenggara kegiatan *Family Development Session* diharapkan dapat memberikan informasi data pada dampak yang diinginkan dalam *Family Development Session* dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti *Family Development Session*.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini disusun dengan merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI (tahun 2017) struktur

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

organisasi skripsi dapat diuraikan berdasarkan keterkaitannya menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan dalam skripsi, tesis, atau disertasi pada dasarnya menjadi bab pengenalan. Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, struktur organisasi skripsi, tesis atau disertasi.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka dalam skripsi, tesis atau disertasi memberikan konteks yang jelas terhadap topic atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bab ini berisi kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini merupakan bagian yang bersifat procedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrument yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini berisikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.

Resta Araisita, 2018

DAMPAK FAMILY DEVELOPMENT SESSION TERHADAP KEMANDIRIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT: Studi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu